



DAMPAK PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG

Selfesina Samadara ¹⁾, Jennie S. Sir, ²⁾Zainudin A. Zainudin ³⁾Moni Y. Siahaan⁴⁾
1,2,3,4) Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Kupang

selfisamadara@gmail.com, jennie_s_sir@yahoo.co.id, Zainudin.ibnu2Gmail.com,
Monijuniati@gmail.com,

ARTICLE HISTORY

Received:
May 4, 2026
Revised
May 16, 2026
Accepted:
June 4, 2026
Online available:
June 16, 2026

Keywords:

Financial Statement Quality, Good Governance; Human Resource Competency; ; Kupang Regency, Local Government;

*Correspondence:

Name: Selfesina Samadara
E-mail: selfisamadara@gmail.com,

Editorial Office

Ambon State Polytechnic
Center for Research and Community Service
Ir. M. Putuhena Street, Wailela-Rumahtiga, Ambon
Maluku, Indonesia

ABSTRACT

Introduction: *The quality of Local Government Financial Statements is an important indicator of public accountability and financial transparency. In Kupang Regency, the improvement of financial reporting quality requires strong governance practices and competent human resources in financial management. This study aims to examine the effect of good governance and human resource competency on the quality of Local Government Financial Statements.*

Method: *This research employed a quantitative approach with a causal associative design. The population consisted of financial and asset management officers from 52 regional apparatus organizations in Kupang Regency. A saturated sampling technique was applied because the population was relatively accessible, resulting in 208 respondents. Data were collected using structured questionnaires and analyzed through multiple linear regression.*

Results: *The reliability test showed that all research instruments were reliable, with Cronbach's Alpha values of 0.913 for good governance, 0.907 for human resource competency, and 0.918 for financial statement quality. The regression analysis produced the equation $Y = 0.673 + 0.485X_1 + 0.326X_2 + e$. The results indicate that good governance has a positive and significant effect on the quality of Local Government Financial Statements, with a significance value of 0.000. Human resource competency also has a positive and significant effect, with a significance value of 0.000. The coefficient of determination shows that 61.2% of the variation in financial statement quality is explained by good governance and human resource competency. This study concludes that good governance and human resource competency significantly contribute to improving the quality of Local Government Financial Statements in Kupang Regency. Strengthening transparent, accountable, and regulation-compliant governance, supported by competent financial officers, is essential to produce reliable and high-quality financial reports.*

Kupang Regency.

INTRODUCTION

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan instrumen penting dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik. Pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan pemerintah harus disusun sesuai prinsip akuntansi pemerintahan agar informasi yang disajikan relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan kemampuan pemerintah dalam mengelola, mencatat, dan mempertanggungjawabkan keuangan publik secara tertib. Laporan keuangan yang berkualitas dapat membantu pemerintah pusat, DPRD, Badan Pemeriksa Keuangan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menilai kinerja keuangan daerah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas laporan keuangan menjadi kebutuhan penting bagi setiap pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Kupang.

Fenomena pada Pemerintah Kabupaten Kupang menunjukkan adanya perkembangan kualitas laporan keuangan. LKPD Kabupaten Kupang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2017-2021, kemudian meningkat menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2022-2024. Peningkatan opini tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam penyajian laporan keuangan. Namun, opini WTP tidak berarti bahwa pengelolaan keuangan telah sepenuhnya bebas dari kelemahan. Beberapa catatan terkait penatausahaan keuangan dan aset tetap masih menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan perlu terus diperkuat melalui tata kelola yang baik dan aparatur yang kompeten.

Salah satu faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah *good governance*. *Good governance* menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, kepatuhan hukum, dan tanggung jawab publik. Prinsip tersebut mendorong pemerintah daerah untuk mengelola keuangan secara terbuka, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan. Mediaty et al. (2025) menemukan bahwa *good governance*, sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian internal, komitmen organisasi, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

Selain *good governance*, kompetensi sumber daya manusia juga berperan penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Aparatur pengelola keuangan harus memiliki pengetahuan akuntansi pemerintahan, pemahaman regulasi, keterampilan menggunakan sistem informasi keuangan, serta ketelitian dalam mencatat dan menyajikan transaksi keuangan. Call et al. (2017) menemukan bahwa organisasi dengan kualitas tenaga kerja yang lebih baik cenderung memiliki kualitas pelaporan keuangan yang lebih tinggi. Abbott et al. (2016) juga menunjukkan bahwa kompetensi pihak yang menjalankan fungsi pengawasan berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.

Kajian empiris pada sektor publik Indonesia juga memperkuat pentingnya faktor manusia dalam kualitas laporan keuangan. Rakhman dan Wijayana (2024) menemukan bahwa pemerintah daerah dengan tingkat pembangunan manusia yang lebih tinggi cenderung memiliki kualitas pelaporan keuangan yang lebih baik. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kapasitas manusia, baik melalui pendidikan, kemampuan teknis, maupun pengalaman aparatur, memiliki hubungan erat dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak hanya ditentukan oleh standar akuntansi, tetapi juga dipengaruhi oleh penerapan *good governance* dan kompetensi sumber daya manusia. *Good governance* menyediakan tata kelola yang transparan dan akuntabel, sedangkan kompetensi sumber daya manusia memastikan proses penyusunan laporan keuangan dilakukan secara tepat dan sesuai standar. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh *good governance* dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Kabupaten Kupang.

Landasan Teori

1. Good Governance

Good governance merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang menekankan penyelenggaraan pemerintahan secara transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, efisien, responsif, berkeadilan, dan taat terhadap hukum. Konsep ini penting dalam sektor publik karena pemerintah mengelola sumber daya yang berasal dari masyarakat dan harus mempertanggungjawabkan penggunaannya secara terbuka.

Menurut Sedarmayanti, *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang solid, bertanggung jawab, efektif, dan efisien dengan menjaga hubungan yang konstruktif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya bergantung pada aturan formal, tetapi juga pada kualitas koordinasi, keterbukaan, dan tanggung jawab antarpelaku pemerintahan.

Mardiasmo menjelaskan bahwa *good governance* merupakan cara mengelola urusan publik secara baik dengan menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, keadilan, dan kepatuhan terhadap aturan hukum. Dalam sektor publik, prinsip akuntabilitas menjadi sangat penting karena pemerintah wajib memberikan pertanggungjawaban atas setiap kebijakan dan penggunaan anggaran kepada masyarakat.

Dwiyanto juga menekankan bahwa *good governance* berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam membangun pelayanan publik yang transparan, responsif, dan akuntabel. Pelayanan publik yang dikelola dengan prinsip tata kelola yang baik akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena setiap proses dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan pendapat Sedarmayanti, Mardiasmo, dan Dwiyanto, *good governance* dapat disimpulkan sebagai sistem tata kelola pemerintahan yang menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, responsivitas, keadilan, dan kepatuhan terhadap hukum. Dalam penelitian ini, *good governance* dipahami sebagai tata kelola yang mendorong pemerintah daerah mengelola keuangan secara tertib, terbuka, bertanggung jawab, dan sesuai peraturan sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Teori Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan individu dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, pengalaman, dan karakteristik pribadi yang mendukung pencapaian kinerja. Dalam organisasi pemerintah, kompetensi aparatur menjadi faktor penting karena penyusunan laporan keuangan membutuhkan pemahaman terhadap regulasi, standar akuntansi pemerintahan, sistem informasi keuangan, serta prosedur administrasi keuangan daerah.

Spencer dan Spencer menyatakan bahwa kompetensi adalah karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan sebab-akibat dengan kinerja efektif atau kinerja unggul dalam suatu pekerjaan. Karakteristik tersebut dapat berupa motif, sifat, konsep diri, pengetahuan, dan keterampilan yang memengaruhi cara seseorang bertindak dalam menyelesaikan tugas.

Wibowo menjelaskan bahwa kompetensi merupakan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan atau tugas yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Pendapat ini menegaskan bahwa pegawai yang kompeten harus memiliki kemampuan teknis, pemahaman kerja, dan sikap profesional agar mampu menghasilkan kinerja yang baik.

Moehariono menjelaskan bahwa kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya. Kompetensi memiliki hubungan dengan pencapaian hasil kerja karena seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan tuntutan jabatan akan lebih mampu menyelesaikan pekerjaan secara tepat dan berkualitas.

Berdasarkan pendapat Spencer dan Spencer, Wibowo, serta Moehariono, kompetensi sumber daya manusia dapat disimpulkan sebagai kemampuan aparatur yang mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, pengalaman, dan karakteristik pribadi yang mendukung pelaksanaan tugas secara efektif. Dalam penelitian ini, kompetensi sumber daya manusia dipahami sebagai kemampuan aparatur pengelola keuangan daerah dalam memahami, mengelola, mencatat, menyusun, dan menyajikan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

3. Teori Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan kemampuan laporan keuangan dalam menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan. Laporan keuangan yang berkualitas harus mampu menggambarkan kondisi keuangan pemerintah daerah secara wajar, dapat dipercaya, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta bentuk pertanggungjawaban publik.

Bastian menjelaskan bahwa laporan keuangan sektor publik merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang disusun untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas publik. Laporan tersebut berfungsi sebagai media pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan sumber daya publik.

Mahmudi menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dilihat dari kemampuan laporan tersebut dalam menyajikan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan tidak hanya harus lengkap, tetapi juga harus berguna bagi pihak yang menggunakan informasi keuangan daerah.

Nordiawan dan Hertianti menjelaskan bahwa kualitas laporan keuangan merupakan ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi agar tujuan laporan keuangan dapat tercapai. Informasi keuangan yang berkualitas harus disusun berdasarkan standar yang berlaku dan disajikan secara jelas agar dapat membantu pengguna dalam menilai akuntabilitas serta kinerja pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan juga menegaskan bahwa laporan keuangan pemerintah harus memiliki karakteristik kualitatif, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Karakteristik ini menjadi dasar dalam menilai apakah laporan keuangan pemerintah daerah telah disusun secara layak dan sesuai standar.

Berdasarkan pendapat Bastian, Mahmudi, serta Nordiawan dan Hertianti, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat disimpulkan sebagai kemampuan laporan keuangan dalam menyajikan informasi keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, mudah dipahami, dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam penelitian ini, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipahami sebagai tingkat ketepatan, keandalan, keterbandingan, dan keterpahaman informasi keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

Hipotesis Penelitian

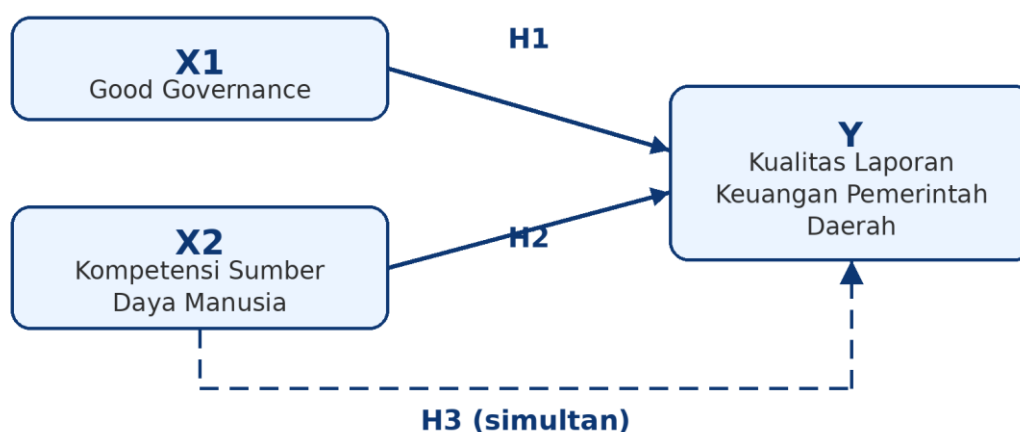
Berdasarkan landasan teori dan hubungan antarvariabel yang telah dijelaskan, hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

- H1: Good governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- H2: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- H3: Good governance dan kompetensi sumber daya manusia secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kerangka Model Penelitian

Kerangka model penelitian menggambarkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *good governance* dan kompetensi sumber daya manusia, sedangkan variabel dependen adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kerangka Model Penelitian



Gambar 1. Kerangka Model Penelitian

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif kausal. Desain ini digunakan untuk menguji pengaruh *good governance* dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kupang. Data utama diperoleh melalui kuesioner, sedangkan literatur dan dokumen resmi digunakan sebagai dasar teoretis dan pendukung pembahasan.

Penelitian dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Fokus penelitian diarahkan pada perangkat daerah yang terlibat dalam pengelolaan keuangan, penyusunan laporan keuangan, pengelolaan aset, dan pengawasan internal. Pemilihan lokasi didasarkan pada relevansi kualitas LKPD sebagai instrumen pertanggungjawaban keuangan daerah.

Variabel penelitian terdiri atas dua variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen pertama adalah *good governance* (X1), yang mencerminkan penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Variabel independen kedua adalah kompetensi sumber daya manusia (X2), yaitu kemampuan aparatur dalam mengelola dan melaporkan keuangan daerah. Variabel dependen adalah kualitas LKPD (Y), yaitu tingkat kesesuaian laporan keuangan dengan karakteristik kualitatif dan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Populasi penelitian adalah aparatur pengelola keuangan dan aset pada 52 perangkat daerah Kabupaten Kupang. Setiap perangkat daerah diwakili oleh empat responden, yaitu PPK-SKPD atau kepala subbagian keuangan, bendahara pengeluaran, staf/operator akuntansi/SIPD/SIMDA, dan pengurus barang atau aset. Dengan demikian, jumlah populasi terjangkau adalah 208 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan *sampling jenuh*, sehingga seluruh anggota populasi dijadikan sampel penelitian.

Data dikumpulkan menggunakan kuesioner tertutup yang disusun berdasarkan indikator setiap variabel. Kuesioner menggunakan skala *Likert* lima tingkat, yaitu 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = netral, 4 = setuju, dan 5 = sangat setuju. Instrumen penelitian diuji melalui uji validitas dan reliabilitas sebelum digunakan dalam analisis utama.

Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan *regresi linear berganda*. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden dan kecenderungan jawaban pada setiap variabel. Sebelum regresi dilakukan, data diuji melalui uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh parsial *good governance* dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas LKPD. Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh simultan kedua variabel independen terhadap kualitas LKPD. Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi kualitas LKPD. Model regresi yang digunakan adalah $Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + e$.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Singkat	Indikator	Skala
Good Governance (X1)	Prinsip tata kelola yang memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan, akuntabel, tertib, dan sesuai regulasi.	Transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan regulasi.	Likert 1-5
Kompetensi SDM (X2)	Kemampuan aparatur dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah berdasarkan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan pemahaman regulasi.	Pengetahuan akuntansi pemerintahan, keterampilan teknis, pengalaman kerja, pemahaman SAP, dan kemampuan menggunakan sistem keuangan.	Likert 1-5
Kualitas LKPD (Y)	Tingkat kesesuaian laporan keuangan pemerintah daerah dengan karakteristik kualitatif berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.	Relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami, tepat waktu, dan sesuai SAP.	Likert 1-5

Penelitian ini menggunakan data primer berbasis kuesioner dengan 208 responden. Analisis dilakukan melalui regresi linear berganda untuk menguji pengaruh *good governance* dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas LKPD Kabupaten Kupang.

RESULT AND ANALYSIS

Hasil utama penelitian menunjukkan bahwa *good governance* dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kupang. Penelitian ini melibatkan 208 responden yang berasal dari 52 perangkat daerah, terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, 18 dinas daerah, 7 badan daerah, dan 24 kecamatan. Seluruh populasi dijadikan sampel melalui teknik *saturated sampling*, sehingga tingkat keterwakilan responden dalam penelitian ini mencapai 100%.

Table 2. Distribution of Population and Sample

Regional Apparatus Group	Number of Units	Respondents per Unit	Total Respondents	Percentage
Regional Secretariat	1	4	4	1.92%
Regional House Secretariat	1	4	4	1.92%

Regional Inspectorate	1	4	4	1.92%
Regional Offices	18	4	72	34.62%
Regional Agencies	7	4	28	13.46%
Districts	24	4	96	46.15%
Total	52		208	100%

Distribusi responden menunjukkan bahwa proporsi terbesar berasal dari kecamatan, yaitu 96 responden atau 46.15%, diikuti oleh dinas daerah sebanyak 72 responden atau 34.62%. Komposisi ini menunjukkan bahwa penelitian mencakup perangkat teknis dan perangkat kewilayahan yang terlibat dalam pengelolaan serta pelaporan keuangan daerah. Keterlibatan pejabat penatausahaan keuangan, bendahara, operator sistem akuntansi, dan pengurus barang memperkuat relevansi data karena jabatan tersebut berhubungan langsung dengan penyusunan laporan keuangan.

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian berada pada kategori tinggi. Good governance memiliki nilai rata-rata 4.18, kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai rata-rata 4.09, dan kualitas LKPD memiliki nilai rata-rata 4.14. Nilai tersebut menunjukkan bahwa responden menilai penerapan tata kelola, kemampuan aparatur keuangan, dan kualitas pelaporan keuangan Kabupaten Kupang berada pada kondisi yang relatif baik.

Table 3. Descriptive Statistics of Research Variables

Variable	N	Minimum	Maximum	Mean	Standard Deviation	Category
Good Governance	208	3.00	5.00	4.18	0.46	High
Human Resource Competency	208	3.00	5.00	4.09	0.49	High
LKPD Quality	208	3.00	5.00	4.14	0.47	High

Uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh instrumen yang digunakan dalam penelitian ini reliabel. Nilai Cronbach's Alpha untuk good governance adalah 0.913, kompetensi sumber daya manusia 0.907, dan kualitas LKPD 0.918. Karena seluruh nilai lebih besar dari 0.70, item kuesioner memiliki konsistensi internal yang kuat dan layak digunakan untuk analisis statistik lanjutan.

Table 3. Reliability Test Results

Variable	Cronbach's Alpha	Criteria	Description
Good Governance	0.913	> 0.70	Reliable
Human Resource Competency	0.907	> 0.70	Reliable
LKPD Quality	0.918	> 0.70	Reliable

Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa model regresi memenuhi syarat statistik untuk pengujian hipotesis. Uji normalitas menghasilkan nilai signifikansi 0.200, lebih besar dari 0.05, sehingga data residual berdistribusi normal. Uji multikolinearitas menunjukkan nilai tolerance sebesar 0.609 dan VIF sebesar 1.642 untuk kedua variabel independen, sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas juga menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0.05, yaitu 0.188 untuk good governance dan 0.246 untuk kompetensi sumber daya manusia, sehingga model tidak mengalami heteroskedastisitas.

Table 4. Classical Assumption Test Results

Test	Variable/Indicator	Value	Criteria	Description
Normality	Kolmogorov-Smirnov Sig.	0.200	> 0.05	Normal
Multicollinearity	Tolerance	0.609	> 0.10	No multicollinearity
Multicollinearity	VIF	1.642	< 10	No multicollinearity
Heteroscedasticity	Good Governance Sig.	0.188	> 0.05	No heteroscedasticity
Heteroscedasticity	Human Resource Competency Sig.	0.246	> 0.05	No heteroscedasticity

Analisis regresi linear berganda menghasilkan persamaan $Y = 0.673 + 0.485X_1 + 0.326X_2 + e$. Persamaan ini menunjukkan bahwa kedua variabel independen memiliki arah pengaruh positif terhadap kualitas LKPD. Koefisien good governance sebesar 0.485 berarti bahwa setiap peningkatan satu satuan pada good governance akan meningkatkan kualitas LKPD sebesar 0.485 satuan, dengan asumsi kompetensi sumber daya manusia tetap. Koefisien kompetensi sumber daya manusia sebesar 0.326 berarti bahwa setiap peningkatan satu satuan pada kompetensi sumber daya manusia akan meningkatkan kualitas LKPD sebesar 0.326 satuan, dengan asumsi good governance tetap.

Table 5. Multiple Linear Regression Results

Variable	Regression Coefficient	t-Statistic	Sig.	Description
Constant	0.673	2.294	0.023	Significant
Good Governance	0.485	7.216	0.000	Significant
Human Resource Competency	0.326	5.483	0.000	Significant

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa good governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD, dengan nilai t-statistic 7.216 dan nilai signifikansi 0.000. Karena nilai signifikansi lebih rendah dari 0.05, hipotesis pertama diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, kepatuhan hukum, dan pengawasan merupakan determinan penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hasil ini sejalan dengan Mediaty et al. (2025), yang menemukan bahwa good governance meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Temuan ini juga mendukung Garcia-Lacalle dan Torres (2021), yang menyatakan bahwa tata kelola publik berkaitan dengan kualitas pelaporan keuangan dan transparansi informasi.

Kompetensi sumber daya manusia juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD, dengan nilai t-statistic 5.483 dan nilai signifikansi 0.000. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua diterima. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa aparatur keuangan yang memahami Standar Akuntansi Pemerintahan, sistem informasi keuangan, penatausahaan aset, pencatatan transaksi, dan penyusunan laporan keuangan lebih mampu menghasilkan laporan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Hasil ini mendukung Rakhman dan Wijayana (2024), yang menemukan bahwa kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Temuan ini juga sejalan dengan Nirwana dan Haliah (2018), yang menyatakan bahwa kompetensi personal memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah.

Hasil uji simultan menunjukkan bahwa good governance dan kompetensi sumber daya manusia secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD. Nilai F-statistic sebesar 161.684 lebih besar dari F-table sebesar 3.040, dengan nilai signifikansi 0.000. Dengan demikian, hipotesis ketiga diterima. Hasil ini berarti bahwa kualitas LKPD tidak hanya ditentukan oleh kompetensi teknis aparatur, tetapi juga oleh sistem tata kelola yang mengatur, mengawasi, dan mengarahkan proses pelaporan keuangan.

Table 6. Hypothesis Test Results

Hypothesis	Relationship	Statistical Result	Decision
H1	Good Governance → LKPD Quality	t = 7.216; Sig. = 0.000	Accepted
H2	Human Resource Competency → LKPD Quality	t = 5.483; Sig. = 0.000	Accepted
H3	Good Governance and Human Resource Competency → LKPD Quality	F = 161.684; Sig. = 0.000	Accepted

Koefisien determinasi menunjukkan nilai R sebesar 0.782, R Square sebesar 0.612, dan Adjusted R Square sebesar 0.608. Nilai R Square sebesar 0.612 menunjukkan bahwa 61.2% variasi kualitas LKPD dapat dijelaskan oleh good governance dan kompetensi sumber daya manusia. Sisanya sebesar 38.8% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian, seperti sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, kualitas sistem informasi keuangan daerah, kepatuhan regulasi, dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

Table 7. Coefficient of Determination

R	R Square	Adjusted R Square	Standard Error of the Estimate
0.782	0.612	0.608	0.291

Temuan terpenting dalam penelitian ini adalah bahwa *good governance* memiliki pengaruh yang lebih dominan dibandingkan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas LKPD. Hal ini terlihat dari koefisien regresi *good governance* sebesar 0.485 yang lebih besar daripada koefisien kompetensi sumber daya manusia sebesar 0.326. Artinya, penguatan mekanisme tata kelola memberikan kontribusi yang lebih kuat terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan dibandingkan peningkatan kompetensi teknis secara terpisah. Namun, kedua faktor tersebut bersifat saling melengkapi. *Good governance* menyediakan kerangka kelembagaan melalui transparansi, akuntabilitas, kepatuhan, dan pengawasan, sedangkan sumber daya manusia yang kompeten memastikan bahwa kerangka tersebut diterapkan secara teknis dalam penyusunan laporan keuangan.

Implikasi hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kualitas LKPD Kabupaten Kupang memerlukan dua strategi terpadu. Pertama, pemerintah daerah perlu memperkuat praktik tata kelola dalam penganggaran, realisasi belanja, penatausahaan aset, pengawasan internal, dan pertanggungjawaban keuangan. Kedua, pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas teknis aparatur keuangan melalui pelatihan berkelanjutan, pendampingan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan penguatan penggunaan sistem informasi keuangan daerah. Penerimaan seluruh hipotesis menegaskan bahwa kualitas LKPD merupakan hasil dari kombinasi antara tata kelola kelembagaan dan kemampuan sumber daya manusia. Oleh karena itu, upaya mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan Kabupaten Kupang perlu memprioritaskan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan patuh regulasi, serta didukung oleh aparatur pengelola keuangan dan aset yang kompeten.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa *good governance* dan kompetensi sumber daya manusia memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kupang. Penerapan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, patuh terhadap regulasi, dan didukung oleh pengawasan yang baik dapat mendorong penyusunan laporan keuangan yang lebih berkualitas.

Kompetensi sumber daya manusia juga menjadi faktor penting dalam menghasilkan LKPD yang baik. Aparatur pengelola keuangan yang memiliki pengetahuan, keterampilan teknis, pengalaman, pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan, serta kemampuan menggunakan sistem informasi keuangan daerah akan lebih mampu menyusun laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, mudah dipahami, dan tepat waktu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas LKPD Kabupaten Kupang tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis aparatur, tetapi juga ditentukan oleh kuatnya tata kelola pemerintahan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kupang perlu terus memperkuat penerapan *good governance* dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama pada aspek transparansi anggaran, akuntabilitas pelaporan, kepatuhan terhadap regulasi, pengawasan internal, penatausahaan aset, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Sebagai rekomendasi, perangkat daerah di Kabupaten Kupang perlu meningkatkan kapasitas aparatur keuangan melalui pelatihan teknis secara berkala, memperkuat koordinasi antara pengelola keuangan dan pengelola aset, serta memastikan setiap temuan pemeriksaan ditindaklanjuti secara tepat waktu. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain, seperti sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, kualitas sistem informasi keuangan daerah, dan tindak lanjut rekomendasi BPK agar kajian mengenai kualitas LKPD menjadi lebih komprehensif.

REFERENCES

- Abbott, L. J., Daugherty, B., Parker, S., & Peters, G. F. (2016). Internal audit quality and financial reporting quality: The joint importance of independence and competence. *Journal of Accounting Research*, 54(1), 3-40. <https://doi.org/10.1111/1475-679X.12099>
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar*. Erlangga.
- BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2023). Pertama kali: Laporan Keuangan Kabupaten Kupang Tahun 2022 dapat opini WTP. <https://ntt.bpk.go.id/pertama-kali-laporan-keuangan-kabupaten-kupang-tahun-2022-dapat-opini-wtp-2/>
- BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2024). Siaran pers LHP LKPD TA 2023 Kabupaten Kupang. <https://ntt.bpk.go.id/wp-content/uploads/2024/06/14.-Siaran-Pers-LHP-LKPD-TA-2023-Kabupaten-Kupang.pdf>
- Call, A. C., Campbell, J. L., Dhaliwal, D. S., & Moon, J. R. (2017). Employee quality and financial reporting outcomes. *Journal of Accounting and Economics*, 64(1), 123-149. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2017.06.003>
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Gadjah Mada University Press.
- García-Lacalle, J., & Torres, L. (2021). Financial reporting quality and online disclosure practices in Spanish governmental agencies. *Sustainability*, 13(5), 2437. <https://doi.org/10.3390/su13052437>

- Mahmudi. (2019). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik. Andi.
- Mediaty, Pontoh, G. T., Nagu, N., HS, R., Mas'ud, A. A., & Aziz, R. H. A. (2025). Human competencies: Amplifying financial reporting quality in Indonesian local government. *Journal of Risk and Financial Management*, 18(8), 424. <https://doi.org/10.3390/jrfm18080424>
- Moehersono. (2014). Pengukuran kinerja berbasis kompetensi. Rajawali Pers.
- Nirwana, & Haliah. (2018). Determinant factor of the quality of financial statements and performance of the government by adding contextual factors: Personal factor, system/administrative factor. *Asian Journal of Accounting Research*, 3(1), 28-40. <https://doi.org/10.1108/AJAR-06-2018-0014>
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2010). Akuntansi sektor publik. Salemba Empat.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Rakhman, F., & Wijayana, S. (2024). Human development and the quality of financial reporting among the local governments in Indonesia. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 56, 100634. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2024.100634>
- Sedarmayanti. (2009). Reformasi administrasi publik, reformasi birokrasi, dan kepemimpinan masa depan. Refika Aditama.
- Spencer, L. M., Jr., & Spencer, S. M. (1993). *Competence at work: Models for superior performance*. John Wiley & Sons.
- Wibowo. (2016). Manajemen kinerja. Rajawali Pers.